

SEMANGAT REFORMASI DAN IMPLIKASINYA DALAM MENGATASI KRISIS DEMOKRASI INDONESIA

Leonardus Gandi *¹
Aurelius Armat ²

^{1,2} Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
*e-mail : leonardusgandi@gmail.com, aureliusarmat@gmail.com ²

Abstract

This article analyzes the significance of demands for reform in overcoming Indonesia's democratic crisis. To analyze this problem, the author uses a qualitative descriptive method on data collected through literature studies. The author tries to find literature related to the title of this scientific paper. Based on the author's research from various literatures, the negative trend of Indonesia's democracy index is due to the rise of oligarchs in the current body of power. Oligarchs are representatives of individual interests. How to overcome this? According to the author, returning to the demands of the reformists can be a way out in addressing the existence of oligarchs in the body of power that is the embryo of the decline of the Indonesian democracy index. The demands of the reformists, especially the demands of Suharto and his cronies, have significance in overcoming the power of oligarchs in Indonesia. This is because the oligarchs who live in power today are an extension of the oligarchs of the new order. They are present through the phenomenon of free hitchhiking. The six demands of the reformasi have significance in stemming the oligarchs and restoring the dignity of Indonesian democracy.

Keywords: Democracy, Oligarchy, Spirit of Reform

Abstrak

Artikel ini menganalisis signifikansi tuntutan reformasi dalam mengatasi krisis demokrasi Indonesia. Untuk menganalisis masalah ini, Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atas data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penulis berusaha mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul tulisan karya ilmiah ini. Berdasarkan penelitian penulis dari berbagai literatur, Tren negatif indeks demokrasi Indonesia disebabkan maraknya oligark dalam tubuh kekuasaan saat ini. Oligark adalah representasi dari kepentingan individu. Bagaimana mengatasi hal ini? Menurut penulis, kembali ke tuntutan kaum reformis dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi keberadaan oligark dalam tubuh kekuasaan yang menjadi embrio menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Tuntutan kaum reformis, khususnya tuntutan adili Soeharto dan kroni-kroninya mempunyai signifikansi dalam mengatasi kekuatan oligark di Indonesia. Sebab, oligark yang hidup dalam kekuasaan saat ini adalah perpanjangan tangan dari oligarki orde baru. Mereka hadir melalui fenomena pemboncengan gratis. Enam tuntutan kaum reformasi memiliki signifikansi dalam membendung oligark dan mengembalikan marwah demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Oligarki, Semangat Reformasi

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem politik, dianggap mampu mendorong kesetaraan akses dan partisipasi mengingat mayoritas rakyat bisa berkepentingan untuk mencegah terjadinya ketimpangan kekayaan (Winters, 2011, p. 5). Namun dalam kenyataan, negara-negara demokrasi memiliki ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi tanpa terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60%. Namun, Indonesia menempati posisi sembilan sebagai negara dengan jumlah individu super kaya di Asia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengutip Winters, Muhammad Ridha menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dalam negara demokrasi disebabkan oleh penyebaran kekayaan yang tidak merata atau terpusat pada sekelompok orang, yang memungkinkan mereka membentuk politik tertentu (Ridha, 2020, p. 5). Dengan kata lain, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam negara-negara demokrasi.

Selain menciptakan ketimpangan sosial ekonomi, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang tertentu juga menjadi penghambat dalam mencapai tujuan demokrasi (Wibowo et al., 2024, p. 237). Fenomena ini menjadi salah satu masalah yang dialami bangsa

Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit 2025* indeks demokrasi Indonesia terus mengalami tren negatif. Bahkan demokrasi ini dikategorikan sebagai demokrasi cacat (Anugrahanto & Yunita, 2025). Ini adalah sebuah ironi. Mengingat demokrasi di bangsa ini diperjuangkan secara susah payah para pendahulu bangsa. Apa penyebabnya? Embrio dari tren negatif indeks demokrasi Indonesia adalah oligarki. Oligarki eksis dalam kekuasaan. Berdasarkan penelitian Robinson dan Hadis, sejak awal sudah ada pembajakan terhadap demokrasi Indonesia (Brown & Orszag, 2006). Oligarki dan demokrasi memiliki tujuan yang berbeda. Oligarki adalah representasi dan kepentingan pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan demokrasi yang menekankan kepentingan bersama.

Artikel ini membedah hubungan antara oligarki dan krisis demokrasi Indonesia. Menurut penulis, krisis demokrasi Indonesia disebabkan oleh maraknya oligark dalam tubuh kekuasaan. Oligark dalam tubuh kekuasaan saat ini adalah keberlanjutan dari oligark orde baru. Mereka hadir melalui fenomena pemboncengan gratis. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Mengatasi masalah ini penulis menganjurkan untuk kembali ke tuntutan kaum reformis. Enam tuntutan kaum reformis: *pertama*, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya; *kedua*, melaksanakan amandemen UUD 1945; *ketiga*, menghapus dwi-fungsi ABRI; *Keempat*, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya; *kelima*, melaksanakan penegakan supremasi hukum. *Keenam*, menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN (Brata, 2006, p. 11). Terlaksananya tuntutan-tuntutan ini dapat menjadi tameng untuk melawan oligark dan mengembalikan marwah demokrasi Indonesia.

Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atas data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk menulis karya ilmiah ini. Penulis mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul tulisan karya ilmiah ini. penulis juga menggunakan literatur yang ditemukan dalam media internet yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Demokrasi Indonesia

Menurut Winters, demokrasi sebagai sistem politik memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi (Winters, 2011, p. 5). Namun dalam kenyataan, ketimpangan sosial dan ekonomi dalam negara-negara berkembang cukup tinggi. Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan dasar demokrasi. Ini adalah sebuah Ironi. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60%. Namun, Indonesia menempati posisi sembilan sebagai negara dengan jumlah individu super kaya di Asia. Fakta-fakta ini, menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Di negeri ini tinggal sekelompok kecil orang yang hidup berkelimpahan sedangkan mayoritas penduduknya hidup dibawa garis kemiskinan.

Keberhasilan pemilu tahun 1999 mengukuhkan posisi negeri ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Keberhasilan ini semestinya memberi angin segar bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan politik dan ekonomi (Haris, 2014, p. xi). Namun ironisnya, ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengutip Winters, Muhammad Ridha menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dalam negara demokrasi disebabkan oleh penyebaran kekayaan yang tidak merata atau terpusat pada sekelompok orang, yang memungkinkan mereka membentuk politik tertentu (Ridha, 2020, p. 5). Akibatnya, alih-alih menciptakan kesetaraan, usai pemilu proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligark. Kekuatan oligark inilah yang membajak demokrasi Indonesia yang mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Harapan besar terhadap perubahan secara mendasar dan signifikan tidak kunjung datang. Setelah dua dekade reformasi bahkan tak begitu jelas kemana arah bangsa kita hendak melaju. Ketimpangan ekonomi memberi dampak buruk bukan hanya bagi masyarakat melainkan juga berbahaya bagi kestabilan bangsa. Alexander Jebadu dalam bukunya *Bahtera Terancam Karam*, menggaris bawahi bahwa, masalah kemiskinan

atau kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (Jebadu, 2018, p. 19).

Selain menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang tertentu berdampak buruk bagi sistem demokrasi itu sendiri. Indeks demokrasi Indonesia terus mengalami tren negatif. Bahkan demokrasi ini dikategorikan sebagai demokrasi cacat (Yunita, 2025). Ini adalah sebuah ironi. Mengingat demokrasi di bangsa ini diperjuangkan secara susah payah para pendahulu bangsa. Apa penyebabnya? Embrio dari tren negatif indeks demokrasi Indonesia adalah oligarki. Oligarki eksis dalam kekuasaan. Demokrasi dan oligarki didefinisikan sebagai distribusi jenis kekuasaan yang berbeda. Demokrasi merujuk kepada kekuasaan politik formal tersebar berdasarkan hak, prosedur, dan tingkat partisipasi rakyat. Sementara oligarki didefinisikan sebagai kekuasaan materiil terkonsentrasi berdasarkan penegakan klaim atau hak atas harta dan kekayaan (Winters, 2011, p. 16). Secara sederhana, demokrasi menekankan kepentingan bersama sedangkan oligarki menekankan kepentingan pribadi. Namun dalam kenyataan, demokrasi melanggengkan oligarki. Mengapa hal ini terjadi? Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus mengetahui arti dari oligarki, oligarki di Indonesia dan fenomena pemboncengan gratis. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Memahami Oligarki

Apa itu oligarki? pertanyaan ini bersifat esensial dalam memahami oligarki secara komprehensif. Secara umum oligark seringkali diasosiasikan dengan kalangan elit yang mengendalikan secara penuh partai politik atau institusi politik lainnya. Sedangkan secara etimologis istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oligarkhia*". Oligarkhia berasal dari dua kata yaitu *oligio* (sedikit) dan *arkhein* (memerintah). Jadi, secara etimologis oligarki diartikan sebagai pemerintahan oleh sedikit orang (Winters, 2011, p. 1).

Oligarki memiliki variasi makna. Akibatnya, konsep tentang oligarki bersifat absurd. Untuk mengatasi absurditas makna ini, memberi batasan tentang apa itu oligarki bersifat urgen. Dalam artikel ini penulis menggunakan definisi dari Jeffrey Winters. Winters dalam bukunya yang berjudul "*Oligarki*" membedakan antara oligark dan oligarki. oligark diartikan sebagai sebagai "pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi atau posisi sosial eksklusifnya" (Winters, 2011, p. 8). Berdasarkan definisi ini, ada tiga unsur dalam oligark. "*Pertama*; kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dari segala sumber daya kekuasaan lain yang bisa terkonsentrasi di tangan minoritas. *Kedua*, penguasaan dan pengendalian sumber daya dilakukan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, oligark selalu individu bukan kelompok atau perusahaan" (Winters, 2011, p. 9). Sedangkan oligarki diartikan sebagai "politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan materiil" (Winters, 2011, p. 10). Pertahanan kekayaan oligark terdiri dari dua bagian. Pertama, *properti defense* (pertahanan harta). *Properti defense* adalah usaha mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik, kedua, *income defense* (pertahanan pendapatan). *Income defense* adalah usaha menjaga sebanyak mungkin pendapat dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman (Winters, 2011, pp. 9-10). Oligarki di dunia memiliki tipe yang berbeda-beda. Winter mengkategorikan oligark ke dalam lima jenis yaitu: oligarki panglima, penguasa kolektif, sultanistik dan sipil. (Winters, 2011, p. 51) Unsur pembentuk oligarki juga bervariasi. Mengutip Samons, Winters menjelaskan bahwa oligarki bisa terbentuk berdasarkan banyak jenis unsur pembentuk seperti kekayaan, birokrasi, silsilah, agama, ciri fisik, koneksi sosial, dan pandangan politik (Winters, 2011, p. 3).

Oligarki di Indonesia

Untuk memahami oligarki di Indonesia, penting untuk melihat kembali asal muasal munculnya oligarki di Indonesia. Oligarki yang ada dalam kekuasaan saat ini merupakan keberlanjutan dari oligarki orde baru yang eksis pada masa Soeharto. Oligark orde lama yang berada dibawah kendali mutlak Suharto. Setelah perang dunia II sampai dua dasawarsa setelah itu, di bawah kepemimpinan presiden Sukarno, Indonesia masih bebas dari genggaman oligark.

Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi. Para oligark muncul setelah Soeharto memegang kekuasaan pada 1965. Para oligark yang tercipta pada awal periode Soeharto merupakan perpanjangan tangan rezim untuk penarikan dan pemindahan, dan fungsi penting pertahanan kekayaan (Winters, 2011, p. 40–41).

Wujud oligarkis pertama dibawah kepemimpinan presiden Suharto adalah oligarkis sultanistik. Apa itu oligarki sultanistik? Menurut winters ada tiga unsur pokok dalam oligarki sultanistik, yaitu: *Pertama*, menguasai sistem politik dan ekonomi. Penguasa sultanistik memerintah secara pribadi dan mengatur segala hal yang penting dalam politik dan ekonomi. *Kedua*, penguasa sultanistik mempertahankan kendali strategis atas akses terhadap kekayaan dan menggunakan sumber daya materil sebagai bagian penting dasar kekuasaan mereka. Hubungan dalam oligarki yang satu dengan yang lain bersifat simbiosis. *Ketiga*, pemerintah sultanistik mencoba mengendalikan kekuasaan pemaksaan di dalam negara atau rezim. Ini termasuk pengendalian angkatan bersenjata, intelijen, polisi, aparat kehakiman, dan kadang melibatkan juga kelompok paramiliter dan preman bayaran (Winters, 2011, p. 201).

Pasca keruntuhan orde baru, oligarki berubah dari oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasaan kolektif, yang mendorong para pengusaha untuk bekerja sama dan membentuk komunitas jabatan yang otoritas (Koho, 2021, p. 71). Kedua jenis oligarki ini (sultanistik dan kolektif) memiliki cara kerja yang berbeda. Salah satunya cara membedakan keduanya adalah melihat bagaimana mereka mempertahankan kekayaan. Dalam mempertahankan kekayaannya para Oligark sultanistik menginvestasikan sumber daya materil sebagai upeti kepada penguasa agar kekayaannya tidak dirampas. Sebaliknya penguasa menjaga dan mempertahankan harta kekayaan oligarki dari ancaman. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan oligark (Winters, 2011, p. 53). Dalam sistem sultanistik tidak berkuasa secara langsung tetapi menikmati perlindungan dari penguasa. Keberhasilan para oligark secara umum tergantung pada seberapa baik sang penguasa tertinggi pengelola pertahanan kekayaan. Oligarki sultanistik di zaman orde baru berpusat di cendana, sedangkan oligarki pasca orde baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Sedangkan oligarki penguasa kolektif memainkan peran ganda yakni sebagai pelaku bisnis dan politis (Wibowo et al., 2024, p. 244). Hal ini disebabkan oleh metode otoritarian orde baru yang membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator. Sedangkan demokratisasi pasca orde baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi elektoral (Winters, 2011).

Fenomena Pemboncengan Gratis Era Reformasi

Apakah Suharto turun atau bergeser ke samping? Media barat menggunakan istilah *step-aside* bukan *step-down* untuk menggambarkan lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Lengsernya Suharto tidak dalam pengertian *step-down*, tetapi lengser dalam pengertian *step-aside* “bergeser ke samping” atau *step back* “berdiri di balik layar”. Suharto dan para oligark yang mendukungnya masih terlibat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini menyebabkan Situasi pseudo-post Suharto yaitu munculnya Soeharto dalam bentuk wajah baru (Winters, 2011, p. 51). Mengapa reformasi tidak mampu mengatasi hal ini?

Dalam penelitian Robinson dan Hadiz, kekuasaan orde lama masih hidup dalam tubuh kekuasaan saat ini. Elit orde baru masih mengendalikan sektor politik dan ekonomi (Brown & Orszag, 2006, p. 35). Artinya, elit politik orde baru yang mendukung kekuasaan Suharto dan tidak memiliki peran dalam gerakan reformasi masih tetap eksis sampai saat ini bahkan mereka tinggal dalam kekuasaan. Robert Mirsel juga menggaris bawahi hal ini. Menurut Mirsel, oligark orde baru eksis dalam reformasi melalui fenomena pemboncengan gratis. Mirsel, memahami fenomena pemboncengan gratis sebagai “hadirnya individu atau kelompok-kelompok baik yang terorganisir maupun tidak dari kekuatan-kekuatan stagnan yang sangat sedikit terlibat atau tidak terlibat sama sekali yang pada awalnya menjadi kekuatan tandingan dalam perjuangan gerakan reformasi namun telah dan sedang mendapatkan keuntungan besar dari gerakan ini” (Mirsel, 2017). Kelompok yang tidak memiliki peran penting dalam memperjuangkan atau bahkan melawan gerakan reformasi telah mengambil keuntungan dari gerakan reformasi. Dengan kata lain, sekelompok elit orde baru yang tidak memiliki sumbangsi apapun terhadap gerakan reformasi

karena membela atau mendukung rezim Suharto, namun berbalik arah tatkala kekuasaan yang dibela melemah atau runtuh (Mirsal, 2017, p. 256). Sejak awal sudah ada pembajakan terhadap demokrasi Indonesia. Runtuhnya rezim kediktatoran Soeharto tidak diikuti oleh kejatuhan elit politiknya. Elit politik lama (khususnya elit politik orde lama) masih menguasai panggung politik Indonesia (Brown & Orszag, 2006, p. 7). Fenomena ini berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Bagaimana mengatasi hal ini?

Mengukur Sukses/Gagalnya Agenda Reformasi

Gerakan reformasi merupakan upaya untuk menumbangkan rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang memimpin selama 32 tahun (1965-1998). Pelopor gerakan reformasi tahun 1998 adalah mahasiswa dan para cendekiawan kampus. Hal inilah yang membedakan gerakan mahasiswa tahun 1996 yang dipelopori atau aktor intelektualnya adalah militer (Buwono, 1999, pp. 46-47). Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis kepercayaan. Gerakan reformasi memiliki enam tuntutan dasar kepada pemerintah, yaitu: *pertama*, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya; *kedua*, melaksanakan amandemen UUD 1945; *ketiga*, menghapus dwi-fungsi ABRI; *Keempat*, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya; *kelima*, melaksanakan penegakan supremasi hukum. *Keenam*, menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN (Brata, 2006, p. 11).

Apakah reformasi berhasil atau gagal? Mengukur gagal atau suksesnya gerakan reformasi dapat dilihat dari agenda yang diusung oleh kaum reformasi. Namun, demi kepentingan tulisan ini, penulis tidak menjelaskan agenda reformasi secara keseluruhan. Penulis hanya menjelaskan beberapa agenda reformasi yang memiliki signifikansi dalam tulisan ini. *Pertama*, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Tuntutan mengadili Soeharto dan kroni-kroninya ternyata hanya sekedar retorika. Hingga hari kematinaya, Soeharto tidak pernah diadili. Begitupun juga dengan orang-orang terdekat Soeharto yang mendukung dan mengambil keuntungan dalam kekuasaan orde baru. Bahkan ironisnya, elit orde baru (pendukung suharto) yang melawan reformasi telah tumbuh dan mengambil keuntungan dalam gerakan reformasi. Selain itu, berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya tak pernah terselesaikan hingga saat ini. *Kedua*, anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Keberhasilan pemilu-pemilu relatif bebas dan demokrasi sejak 1999 mengukuhkan negeri ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Namun, prestasi ini berbanding terbalik dengan kegagalan negara menegakan tata kelola yang baik yang bersih serta bebas korupsi. Fenomena ini berbanding terbalik dengan tingkat korupsi tahun 1950-an yang relatif sangat rendah (Winters, 2011, p. 227). Beberapa kasus korupsi besar yang melanda Indonesia saat ini yaitu: kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun, kasus pertamina (193,7 triliun), skandal BLBI (rp 138,4 triliun) dan masih banyak kasus korupsi lainnya yang merugikan negara mencapai triliunan rupiah (Puspita, 2025). Kasus-kasus ini menegaskan akutnya masalah korupsi di Indonesia. Selain korupsi, kolusi dan nepotisme di menjadi masalah kronis Indonesia. Berdasarkan data freedom House, menurunnya indeks demokrasi Indonesia disebabkan oleh maraknya praktik kolusi dan nepotisme. Puncaknya adalah pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. *Ketiga*, mengembalikan supremasi hukum. Agenda ini belum sepenuhnya dijalankan. Ada beberapa gejala yang memperlihatkan hal ini seperti maraknya korupsi oleh para penegak hukum dalam segala lini termasuk lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga kehamitan (Kumalasanti, 2025). *keempat* menghapus dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI sering menimbulkan kecaman dan kritikan. Kecaman itu berpusat di sekitar penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa militer khususnya praktik yang berlebihan. Beberapa personel militer yang menjadi kepala desa, camat, bupati atau gubernur sering menggunakan paksaan dan metode-metode militer dalam hubungan mereka dengan rakyat di bawah wewenang mereka. Banyak pula keberadaan mereka dikritik karena tidak memiliki kemampuan dalam memegang jabatan-jabatan politik (Singh, 1995, p. 5). Momentum gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1997 sampai periode tahun 1998, telah memberi tekanan yang sangat kuat dan tampak tidak dapat dihindarkan bagi ABRI untuk melakukan redefinisi dan memformulasikan kembali

bagaimana sebaiknya merumuskan perannya dalam bidang di luar pertahanan dan keamanan. Dwi-fungsi ABRI telah dihapus dimana anggota militer aktif tidak lagi mengemban jabatan sipil dalam pemerintahan. Selain itu, kepolisian republik Indonesia (POLRI) telah dipisahkan dari TNI dan langsung menjadi lembaga tinggi negara yang berada di bawah presiden. Dengan demikian, telah terjadi demiliterisasi POLRI dan menjadi kekuatan sipil yang dalam wacana akan disubordinasikan di bawah Departemen Dalam Negeri di kemudian hari. Namun setelah 27 tahun setelah orde baru runtuh, kekhawatiran akan hidupnya dwifungsi ABRI justru kembali muncul. Pasalnya, revisi UU TNI bakal memperluas jabatan kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI (Ramadhan, 2025).

Mengembalikan semangat reformasi

Runtuhnya orde baru 1998 dan lahirnya reformasi serta keberhasilan pemilu tahun 1999 semestinya memberi angin segar bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan politik dan ekonomi (Haris, 2014, p. xi). Reformasi memberi harapan baru masyarakat Indonesia. Namun, indeks demokrasi Indonesia terus mengalami distorsi bahkan dikategorikan sebagai demokrasi cacat. Ini adalah sebuah ironi. Sebab para pendahulu bangsa telah memperjuangkan demokrasi Indonesia secara susah payah. Mengapa hal ini terjadi? Tren negatif demokrasi Indonesia disebabkan oleh pembajakan demokrasi pasca runtuhnya orde baru 1998. Wajah lama masih berkuasa dalam kekuasaan. Keruntuhan rezim orde baru tidak dibarengi dengan kejatuhan para pendukung politiknya.

Bagaimana mengatasi krisis demokrasi Indonesia? Pertanyaan ini bersifat urgen di tengah fenomena mundurnya demokrasi Indonesia. Untuk mengembalikan marwah demokrasi, negara ini mesti bebas dari genggaman oligark. Secara historis fenomena oligarki di Indonesia muncul pasca runtuhnya orde lama. Orde baru di bawah komando presiden Soeharto memberi peluang tumbuhnya para oligark. Winters mengkategorikan oligarki orde baru sebagai oligarki sultanistik. Pasca runtuhnya Soeharto, oligarki orde baru bertransformasi menjadi oligarki penguasa kolektif.

Berdasarkan fakta ini, tuntutan kaum reformis memiliki signifikansi dalam melawan para oligark dan mengembalikan marwah demokrasi. Tuntutan kaum dijalankan secara setengah hati. Beberapa memperlihatkan keberhasilan namun tidak sedikit yang memperlihatkan tanda-tanda kegagalan. Hal ini menuntut suatu evaluasi yang serius peroses perjuangan dengan agenda-agenda reformasi. Penting untuk kembali ke tuntutan kaum reformis. Terlaksananya tuntutan ini memberikan dampak positif bagi demokrasi Indonesia, khususnya membebaskan demokrasi Indonesia dari genggaman oligark. Hal termaktup dalam tuntutan adili Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, wajah elit politik lama yang hadir dalam reformasi melalui fenomena pemboncengan gratis mesti disingkirkan. Hal ini dapat dilihat dalam fenomena pensiunan jenderal-jenderal masuk partai politik atau mendirikan partai politik sendiri. Mereka ini pada masa perjuangan reformasi hampir tidak memiliki peran atau kontribusi karena berada pada posisi membela rezim yang sedang berkuasa (Mirsell, 2017, p. 31).

KESIMPULAN

Oligarki dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Oligark adalah representasi dari kepentingan pribadi sedangkan demokrasi merupakan representasi dari kepentingan umum. Namun dalam kenyataan sistem demokrasi melanggengkan kekuasaan oligark. Fenomena ini nampak dalam negara kita saat ini. Oligark tinggal dalam kekuasaan. Oligark yang bercokol dalam tubuh kekuasaan saat ini, merupakan keberlanjutan dari oligark yang ada pada orde baru. Reformasi tidak berhasil dalam meruntuhkan oligark orde baru. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah pelaksanaan agenda reformasi yang setengah hati, khususnya tuntutan adili Soeharto dan kroni-kroninya. Agenda-agenda reformasi belum sepenuhnya dijalankan. Oleh karena itu, mewujudkan kembali agenda-agenda reformasi bersifat urgen. Agenda reformasi dapat menjadi tameng dalam melawan oligarki yang menjadi embrio krisis demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Buwono, S. S. H. (1999). *Pencerminan Di Kalbu Rakyat* (1st ed.). Penerbit Kanisius.
- Brata, T. N. (2006). *Prahara Reformasi Mei 1998*. UPT: UNNES Press.
- Brown, J. R., & Orszag, P. R. (2006). The political economy of government-issued longevity bonds. *Journal of Risk and Insurance*. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2006.00191.x>
- Freedom house , “Freedom In the World 2024”, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024>
- Haris, S. (2014). *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jebadu, A. (2018). *Bahtera Terancam Karam* (I). Penerbit Ledalero.
- Kumalasanti, Sinta Rita. Mutasi Hakim itu Bukan Soal Rasa, tapi Data, Kompas.id. dalam <https://www.kompas.id/artikel/mutasi-hakim-itu-bukan-soal-rasa-tapi-data-3>, diakses 15 Mei 2025
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Melynda Dwi Puspita, 10 Kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Tempo. Dalam, <https://www.tempo.co/ekonomi/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia-terbaru-minyak-mentah--1212298>
- Mirsel, R. (2017). Pembonceng Gratis Gerakan Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ledalero*, 13(2), 239. <https://doi.org/10.31385/jl.v13i2.73.239-262>
- Nino Citra Anugrahanto dan Kurnia Yunita. Satu Dekade Tren demokrasi indonesia turun, Kompas. Id. Dalam <https://www.kompas.id/artikel/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun>, diakses 05 Mei 2025
- Pitoyo, Sight.
- Regar, Rachel Farahdiba. “Aksi Mahasiswa di berbagai daerah gelar protes DPR soal anulir putusan MK”, *Tempo*, <https://nasional.tempo.co/read/1907397/aksi-mahasiswa-di-berbagai-daerah-gelar-protes-dpr-soal-anulir-putusan-mk>.
- Ridha, M. (2020). *Oligarki: Teori dan Kritik* (A. M. Mudhoffir & C. H. Pontoh (eds.)). CV. Marjil Kiri.
- Singh, B. (1995). *Dwifungsi ABRI Asal Usul, Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Media of Law and Sharia Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 231–246. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>
- Winters, J. (2011). *Oligarki*. PT Gramedia Pustaka Utama.